



Unit Penelitian dan Penerbitan
Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Gadjah Mada

SASDAYA,
Gadjah Mada Journal of Humanities

ISSN: 2548-3218 (print); ISSN : 2549-3884 (online); website: <https://jurnal.ugm.ac.id/sasdayajournal/index>

- ✍ Semarang dan Surabaya dalam Perspektif Historis dan Ekonomi Kota: Sebuah Pemikiran Historiografis
- ✍ Semarang and Surabaya in the Historical and Economic Perspective of Town: A Thinking of Historiography
- ✍ Penulis/Author(s) : Putri Agus Wijayati
- ✍ Sumber/Source : SASDAYA, *Gadjah Mada Journal of Humanities*, Vol. 2, No. 1 (November 2017), pp. 334-350
- ✍ DOI:
- ✍ Penerbit : Unit Penelitian dan Publikasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Indonesia

SEMARANG DAN SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN EKONOMI KOTA: SEBUAH PEMIKIRAN HISTORIOGRAFIS

Putri Agus Wijayati¹

ABSTRAK

This article describes the economic history of the town and its dynamics. As part of the historical reality, urban economics further accentuates its economic elements based on trade, industry and services activities. Of the three factors above, which one actively contributes to growth in urban economic development? Or, among the three, may be intertwined or synergised, which in turn form a support force that can stimulate the economic growth rate of a city. However, is it that simple in explaining the economic history of the town?, because a historical study must also be considerate of changes over time, while when discussed is the economic dimension, then, we are dealing with statistical data used to understand a change in time, as is done by quantitative economic history. This paper takes spatial space in the cities of Surabaya and Semarang as both cities, dominantly influenced by elements of trade, industry and services.

Keyword: *Historical and economic perspective, town, and historiography*

PENGANTAR

Dalam konteks historiografis, model yang dipinjam dalam tulisan ini adalah dengan membandingkan ekonomi Kota Semarang dan Kota Surabaya, karena kebijakan ekonomi selalu lebih berorientasi kepada sebuah tujuan untuk kesejahteraan, atau setidaknya menipiskan jurang antara “yang punya” dan “yang tidak punya” dalam pengertian ekonomi. Hanya saja dalam perdebatan akademis, konsep kesejahteraan (*welfare*) bisa dimaknai sebagai hasil dari konstelasi antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik dalam suatu wilayah. Oleh karena itu tulisan ini akan memberikan pemetaan mengenai perekonomian Kota Semarang dan Kota Surabaya, terutama dalam hubungannya dengan salah satu ruang ekonomi, yakni pasar. Pasar merupakan sebagian kecil yang menjadi indikator dalam melihat ekonomi perkotaan. Ekonomi di pasar dapat dilihat pada bagaimana transaksi ekonomi dan transaksi politik berjalan, berproses, dan bertumbuh dalam sebuah komunitas warga perkotaan. Pertanyaan yang kemudian muncul dalam tulisan ini

¹Dosen pada Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Email: putrikdiri1962@gmail.com.

adalah, bagaimana memahami ekonomi kota dalam perspektif historiografis? Aktivitas ekonomi apa saja yang bisa diidentifikasi sebagai karakteristik dari ekonomi di perkotaan? Dua pertanyaan sederhana itu, tentu saja memerlukan penjelasan yang memadai dalam wacana akademis, baik dalam tataran konseptual, teoritis, maupun substansi faktual. Untuk melengkapi jawab atas pertanyaan satu dan dua, perlu ditambahkan pertanyaan ketiga, yakni untuk siapa dan kesejahteraan seperti apa yang dialami oleh kedua kota. Selain itu, Siapa yang mendapatkan dan menikmati “sejahtera”, apakah lapisan masyarakat di tingkat atas yang memiliki kuasa dalam menentukan keputusan ekonomis dan kebijakan politis, atau apakah juga ditujukan untuk lapisan masyarakat kebanyakan, karena konsep sejahtera juga sangat relatif. Dengan cara berpikir seperti itulah tentunya ada parameter-parameter yang bisa digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta sejarah agar bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.

Pada spektrum lain, membicarakan ekonomi kota dan kesejahteraan untuk masyarakat kebanyakan, akan menjumpai arena (ruang) ekonomi yang disebut pasar. Pasar di kota dengan sendirinya merupakan bagian dari ritme kehidupan ekonomi warga kota, bagaimana sebuah kota berkembang jika dicermati melalui dimensi ekonomi dan bagaimana pasar ikut memainkan perannya sehingga terlibat aktif di dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian kota. Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*, seperti dikutip oleh Zaim Saidi bahwa kemajuan masyarakat suatu kota, selain karena jumlah dan keragaman warganya, juga ditentukan oleh dinamika pasar-pasarnya.² Pasar yang penuh vitalitas dan dinamis menjadi simbol dan pertanda dari masyarakat yang maju.

PERSPEKTIF PARA AHLI TENTANG TEORI EKONOMI DAN SEJARAH

Meminjam pernyataan Thee Kian Wie, bahwa pokok perhatian sejarah ekonomi adalah proses dan masalah perubahan ekonomi yang berjalan bersama waktu, lebih khusus masalah perubahan struktural jangka panjang yang mendasari esensi perkembangan ekonomi.³ Menurutnya, dalam perspektif ekonom, *stressing* sejarah ekonomi lebih ditekankan pada dinamika ekonomi. Dalam satu hal, teori dinamika ekonomi⁴ bersentuhan dengan perspektif historis dan pada waktu bersamaan juga perspektif pembangunan masa depan, sebagaimana yang disinggung

²Zaim Saidi, “Menghidupkan Hari Pasaran”, *Republika*, Sabtu, 17 November 2012, No. 303, Th. Ke-20.

³Pernyataan itu dikutip dari Sumitro Djojohadikusumo, “Pendekatan Seorang Ekonom terhadap Perspektif Historis, Beberapa Pengamatan Acak”, dalam J. Thomas Lindblad (Ed), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 58.

⁴Untuk penjelasan mengenai dinamika ekonomi, Djojohadikusumo meminjamnya dari Boumol yang mendefinisikan dinamika ekonomi sebagai studi tentang fenomena ekonomi yang mempunyai jalinan antara peristiwa yang mendahului dengan peristiwa sesudahnya atau yang mengikutinya. *Ibid.*, hlm. 59.

Djojohadikusumo merupakan mata rantai yang bisa diretas keterhubungannya antara teori ekonomi umum dengan teori ekonomi pembangunan.

Teori perubahan struktural menekankan pada mekanisme yang memungkinkan negara yang masih dikategorikan ke dalam kriteria terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negerinya dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan kota, serta memiliki sektor industri manufaktur dan sektor jasa yang tangguh.⁵ Meminjam istilah Kuntowijoyo dalam “menjelaskan”,⁶ model perubahan struktural untuk “analisis”, menggunakan perangkat neoklasik dan metode ekonometri modern untuk menjelaskan terjadinya proses transformasi.

Thee Kian Wie pada awal tulisannya menyarankan agar penelitian sejarah⁷ lebih fokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.⁸ Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masalah dan kendala dalam pembangunan ekonomi di negara-negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang, semisal dari segi pembuat kebijakan. Pengalaman historis dari negara-negara industri modern sebagian besar tidak relevan dengan masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Banyak penelitian dari pengalaman historis negara-negara industri yang lebih tua serta negara-negara industri baru sejauh ini gagal untuk menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan teori tunggal pembangunan ekonomi.

Dalam memahami proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di banyak negara, para ekonom belum mampu membuat formula tepat atas interaksi fungsional di antara berbagai determinan, seperti penduduk, sumber daya alam, dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan alasan ini, para

⁵ W. Arthur Lewis dengan model teoritisnya tentang “surplus tenaga kerja dua sector” dan Hollis B. Chenery dengan analisis empirisnya tentang “pola-pola pembangunan” merupakan pendukung aliran pendekatan perubahan struktural. Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Alih bahasa: Haris Munandar & Puji A.L., (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), hlm. 133.

⁶Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).

⁷Mengikuti pemikiran yang dikonseptualisasikan Bambang Purwanto bahwa habitat utama dan dasar orientasi sejarah sebagai historiografis lebih pada masa kini dan masa depan yang diharapkan akan dituju. Artinya, pendekonstruksian makna sejarah merupakan sesuatu yang penting untuk membangun konstruksi akademis baru yang mempunyai relevansi dengan kekinian dan masa depan. Bambang Purwanto, “Dekonstruksi Historiografis dan Mencari Pemikiran Kesejarahan Yang Mencerdaskan”, Makalah disampaikan pada *Studium General* Program Studi Pendidikan IPS Program Pascasarjana Unnes, Semarang 19 Maret 2011. Rekonsiliasi antara perspektif sejarah dan perspektif ekonomi nampaknya sebuah upaya yang tepat untuk menghasilkan sebuah konstruksi sejarah, yang bisa jadi memberikan manfaat bagi penentu kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan pembangunan ekonomi.

⁸Sebagian besar diskusi yang dimuat pada bagian ini menggunakan tulisan Thee Kian Wie, *Explorations in Indonesian Economic History*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI –LIPI, 1994).

ekonom tidak mampu mengembangkan "teori umum pertumbuhan ekonomi" yang dapat menjelaskan masalah dalam kasus-kasus pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi pembangunan, agar efektif, harus didasarkan pada kerangka konseptual yang memadai yang berasal dari teori tertentu atau model pertumbuhan yang benar-benar telah divalidasi yang sesuai dengan pengalaman sebenarnya. Artinya, dengan bahasa yang berbeda, penggunaan metode dan teknik statistik diperlukan untuk memverifikasi apakah teori sesuai dengan bukti empiris ketika akan diaplikasikan.

Perumusan teori tertentu atau hipotesis digunakan untuk menganalisis atau menjelaskan peristiwa-peristiwa tertentu yang didasarkan pada generalisasi fakta atau bukti empiris.⁹ Dalam penelitian sejarah, khususnya dalam studi sejarah ekonomi, formulasi dan pengujian teori atau model pertumbuhan, terutama didasarkan pada dua kategori. Kategori pertama dari data *cross section* dan kategori kedua berdasarkan data *time series*. Para ekonom, seperti Colin Clark dan Simon Kuznets, melakukan beberapa studi menarik yang didasarkan pada eksplorasi intensif terhadap data *cross section* dari sejumlah negara pada tingkat pendapatan yang berbeda. Tujuan studi *cross section* adalah untuk mengidentifikasi keseragaman dalam pola pertumbuhan ekonomi antar negara, yaitu dengan mempelajari pola-pola ekonomi pada tingkat perkembangan yang berbeda.

Hollis B. Chenery, seorang ekonom terkemuka dari Universitas Havard dan Houthakker, melakukan studi banding berdasarkan data *cross section* dari sejumlah negara pada tingkat pendapatan yang berbeda. Studi mereka paling berharga dalam mengidentifikasi kesamaan luas serta perbedaan antara negara di berbagai tingkat pembangunan ekonomi. Satu hal yang perlu diperhatikan, kelemahan studi ini tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi jangka panjang sejarah yang terjadi dalam proses pertumbuhan suatu negara. Kelemahan lebih serius pada studi *cross section* adalah bahwa generalisasi yang berasal dari pengamatan dalam periode waktu tertentu di berbagai negara mulai dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, kurang efektif untuk bisa dijadikan ramuan yang tepat dalam menyusun sebuah kebijakan pembangunan ekonomi bagi negara dunia ketiga. Di sisi lain, berbagai pengamatan studi *cross section* melibatkan rentang waktu yang lebih lama daripada rentang waktu kebijakan pembangunan, sehingga generalisasi hanya berlaku untuk perencanaan pembangunan selama rentang waktu tertentu. Bisa jadi sangat dimungkinkan, beberapa dari negara-negara berkembang (dunia ketiga) telah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat secara historis, tetapi di antaranya mengalami proses pertumbuhan yang memerlukan waktu lebih lama untuk mencapainya. Ada juga, di antaranya yang mengalami pertumbuhan dengan tingkat yang jauh lebih rendah.

Kelemahan studi *cross section* (antar negara pada periode tertentu) perlu dilengkapi dengan studi berdasarkan data *time series* (meliputi sejumlah negara

⁹ Perdebatan antara pengamatan empiris dan pembentukan teoretis pada akhirnya memiliki kemiripan dengan perbedaan teori antara "aliran sejarah" dengan "ekonom matematika". Pierre Villar, "Constructing Marxist History", dalam Jacques Goff & Pirre Norra (Ed.), *The Past: Essays in Historical Methodology*, (London, New York: Cambridge University Press, 1985), hlm. 55.

tertentu sepanjang kurun waktu yang cukup panjang). Tidak kalah pentingnya, akan lebih relevan jika melakukan pembahasan tentang sejarah ekonomi adalah studi komparatif Kuznets yang didukung verifikasi empiris mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Kuznets menekankan pentingnya data *time series* dalam kerja riset.¹⁰ Data *time series* merupakan rekaman pengalaman historis dan sering digunakan untuk menguji teori atau model pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan bahaya dengan mengandalkan data *time series* saja bisa menjadi kecenderungan untuk memperlakukan pengalaman historis dari satu negara yang unik. Untuk menghindari bahaya ini, ekonom atau sejarawan ekonomi menyarankan dengan melakukan studi banding. Hal itu terjadi karena ada peningkatan luar biasa dalam informasi statistik, termasuk statistik ekonomi, di berbagai negara selama tiga dekade terakhir, sehingga menjadi sangat dimungkinkan untuk menggunakan data *cross section* dan data *time series* dalam satu kerja riset agar bisa saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing data.

Studi Hollis B. Chenery dan Moshe Syrquin yang secara khusus melakukan penelitian tentang pola-pola pembangunan selama kurun waktu 1950 hingga 1970 di sejumlah negara dunia ketiga merupakan model perubahan struktural yang paling terkenal. Sebuah studi komparatif dalam penelitian empiris yang dikerjakan Chenery secara *cross sectional* dan *time series*. Penelitian itu merupakan upaya untuk memberikan analisis yang komprehensif dari perubahan struktural yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai bahan kajian untuk mengidentifikasi karakteristik yang kemungkinan secara dominan mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan, maka negara-negara berkembang dengan keberagaman tingkat pendapatan perkapita dijadikan objek kajiannya. Beberapa variabel yang dijadikan bahan studi di antaranya: transisi dari pola sektor agraris ke industri, kesinambungan akumulasi modal fisik dan manusia, perubahan jenis permintaan konsumen dari produk kebutuhan pokok ke berbagai jenis barang manufaktur serta jasa, perkembangan daerah perkotaan terutama pusat industri karena dorongan migrasi penduduk dari pedesaan.¹¹

¹⁰Kuznets adalah salah satu pendukung Keynesian. Keynes berasumsi, campur tangan pemerintah terutama diperlukan kalau perekonomian berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pengaruh Keynes terhadap negara-negara berkembang yang ingin melihat pembangunan ekonominya berhasil sangat besar. Berkat pemikiran Kuznets, pengertian pokok teori Keynes dapat diwujudkan secara kuantitatif-empiris. Dengan analisis *time series*, tidak sebatas mengetahui “yang sudah dan sedang terjadi”, namun juga mampu memperkirakan, dan mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan di masa mendatang. Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 159-176.

¹¹ Hipotesis utama model perubahan struktural, yaitu pembangunan merupakan proses pertumbuhan dan perubahan yang dapat diamati yang karakteristiknya sama di semua negara. Namun, model ini juga mengakui adanya keberbedaan dalam pola umum pembangunan karena sejumlah faktor. Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Op. Cit.*, hlm. 140-141.

RELEVANSI TEORI EKONOMI DALAM PENJELASAN SJARAH

Penelitian sejarah perkembangan ekonomi memiliki fungsi penting untuk memberikan pemahaman tentang proses pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu dan faktor-faktor penentu perkembangan.¹² Dalam mempelajari proses pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, diperlukan suatu model teori yang komprehensif yang bisa "menjelaskan" proses dan pola perkembangan ekonomi serta digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu perkembangan itu. Inilah letak kebutuhan bagi pendekatan sejarah yang paling penting, jika ingin, seperti yang sering dikatakan Marx, yakni "memahami fakta". Dengan cara itu, kita bisa memahami bagaimana suatu teori, yang barangkali hanya mengungkapkan satu bagian dari salah satu faktor, dapat digunakan untuk melihat sesuatu yang sifatnya universal selama jangka waktu tertentu.¹³ Jangka waktu itu harus disusun, dimengerti, dipahami, dimaknai, karena terdiri atas pergantian antara kegagalan dan keberhasilan.

Studi tentang proses perkembangan ekonomi telah memungkinkan ekonom dan sejarawan ekonomi untuk mengisolasi elemen penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Meskipun teori umum pertumbuhan ekonomi tidak tersedia, hal itu menunjukkan bahwa penggunaan satu model teori untuk menjelaskan proses perkembangan ekonomi masih dipandang perlu, terutama model-model yang secara eksplisit dirumuskan dan divalidasi untuk menguji bukti empiris.

Dalam hal penggunaan model teori, beberapa sejarawan, termasuk sejarawan ekonomi, menjadi prihatin. Secara umum, keprihatinan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa model teoretis merupakan abstraksi dan distorsi realitas, di mana fakta sering diperas dan dimanipulasi agar bisa masuk atau "dipaksa disesuaikan" dengan konstruksi teori dari suatu model. Dengan cara ini, studi sejarah bisa dimungkinkan akan menghasilkan kesimpulan yang telah ditentukan oleh premis dasar model, bukan didasarkan atas fakta-fakta sejarah. Sementara itu teori, termasuk teori-teori ekonomi, dapat menyesatkan dan bahkan salah, atau bisa jadi tidak tepat dan tidak akurat untuk memahami dan menjelaskan masa lalu.

Sejak tahun 1960 generasi baru sejarawan ekonomi di Amerika Serikat mulai merintis pendekatan baru untuk studi sejarah ekonomi. Tiga faktor kontribusi terhadap perkembangan: kemajuan teori ekonomi, termasuk teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi, didorong oleh minat baru dalam studi ekonomi pembangunan; peningkatan minat pada sebagian ekonom dalam pengujian yang lebih tepat untuk hipotesis mereka, dan meningkatnya volume data statistik di masa lalu. Pendekatan itu, seperti yang disampaikan Houben dan Lindblad,¹⁴ terletak pada perhatian para ekonom di suatu wilayah yang pada lazimnya berlaku ilmu politik

¹² Thee Kian Wie, *op.cit.*, hlm. 6.

¹³ Pierre Villar, *op. cit.*, hlm. 56.

¹⁴ V.J.H. Houben dan J.Th. Lindblad, "Menuju Historiografi Ekonomi Nasional di Indonesia", dalam J.Th. Lindblad (Ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, 2002), hlm. 5.

dan penggunaan perspektif historis jangka panjang ketika mengamati perkembangan ekonomi. Perkembangan baru dalam studi sejarah ekonomi selama dua dekade terakhir telah mempengaruhi penggunaan metodologi ilmiah dan pengukuran kuantitatif. Oleh karena itu salah satu yang menjadi ciri sejarah ekonomi baru adalah penerapan teori ekonomi untuk menjelaskan fakta sejarah (tidak perlu harus kuantitatif). Pemahaman historis, sebagaimana ditekankan P.W. Klein, memerlukan daya kritis, pengujian, pembuktian, penjelasan, falsifikasi, rekonstruksi, dan pembaharuan data secara terus menerus. Kesemuanya itu akan bermuara pada kebutuhan akan suatu metodologi dan teknik yang lebih kita kenal dengan label “New Economic History” atau “Sejarah Ekonomi Kuantitatif”.¹⁵

Dalam kasus yang berbeda, penerapan teori ekonomi neo-klasik dalam studi sejarah ekonomi memiliki dua kelemahan. Pertama, teori ekonomi neo-klasik tidak dirancang untuk menganalisis peran faktor-faktor non-ekonomi dalam perubahan ekonomi jangka panjang. Kedua, dalam konteks permasalahan yang akan dianalisis, teori ekonomi neo-klasik hanya menyediakan jawaban yang terbatas. Untuk mengatasi dua kelemahan ini, North, salah seorang ideolog dari *New economic history* mengatakan bahwa terdapat dua pilihan jika akan menggunakan model teori ekonomi neo-klasik dalam sebuah kajian. Pertama, pilihan yang sangat radikal yaitu merombak keseluruhan teori neo-klasik dan memulainya dari awal lagi. Sementara alternatif lain adalah dengan memperluas kerangka acuan teori neo-klasik yang memungkinkan sejarawan ekonomi menangani masalah yang akan diteliti. Sebenarnya, ekonomi neo-klasik tidak hanya memberikan pengaruh besar pada sejarah ekonomi, namun pada studi perkembangan ekonomi secara umum, setidaknya seperti yang dipraktekkan di negara-negara Barat. Terakhir, ekonomi Marxis dan neo-Marxis telah mendapatkan popularitas di negara-negara ini sebagai alat teoretis untuk mempelajari masalah keterbelakangan. Namun, ekonomi neo-klasik masih tetap menjadi mainstream dalam perkembangan ekonomi. Dengan menyediakan bangunan teoritis untuk studi perkembangan ekonomi, teori neo-klasik juga sangat mempengaruhi jenis dan arah kebijakan pembangunan di banyak negara berkembang. Pengaruh teoretis kebijakan pembangunan dimanifestasikan dalam tiga cara: pertama, teori neo-klasik memandang perkembangan ekonomi merupakan proses bertahap dan berkesinambungan. Kedua, teori neo-klasik juga memandang proses perkembangan ekonomi sebagai sesuatu yang harmonis dan kumulatif, perkembangan ekonomi telah menganjurkan ketergantungan pada mekanisme *equilibrium* setiap kali terdapat kecenderungan *disequilibrium* dalam perekonomian. Ketiga, pada dasarnya pandangan optimis dan manfaat dari perkembangan ekonomi telah bergantung pada *trickle-down efek* dari pertumbuhan ekonomi.

Menurut ekonomi neo-klasik, dengan demikian, berarti bahwa perubahan ekonomi adalah tidak mengganggu dan didorong oleh penyesuaian marjinal. Penyesuaian marjinal mencerminkan, mekanisme harga dalam memenuhi fungsi

¹⁵ P.W. Klein, “Pidato Kunci: Penulisan tentang Ekonomi Nasional di Indonesia”, dalam J.Th. Lindblad (Ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, 2002), hlm.19.

penting untuk mempromosikan perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, analisis *ekuilibrium* parsial, secara umum teori ekonomi neo-klasik sesuai untuk analisis perkembangan ekonomi. Daya tarik intelektual teori neo-klasik bagi banyak ekonom adalah bahwa, hal itu mampu mengembalikan keteraturan.

Pandangan optimis ekonom neo-klasik, bahwa perkembangan ekonomi merupakan proses bertahap, lancar, dan berkesinambungan. Gambaran itu mendapat kritik, terutama dari ekonom Marxis, neo-Marxis, dan sejarawan ekonomi. Alih-alih secara bertahap, lancar atau halus, dan berkesinambungan, ekonom Marxis dan sejarawan ekonomi melihat proses perkembangan ekonomi sebagai suatu konflik dan *disequilibria*. Dua fitur utama analisis Marxis dari proses perkembangan adalah cara atau mode produksi dan materialisme dialektika. Sehubungan dengan cara produksi, sejarawan ekonomi Marxis berpendapat bahwa setiap zaman sejarah memiliki identitas yang dibentuk oleh cara di mana alat-alat produksi dimiliki, oleh hubungan antara individu dalam proses produksi, dan oleh materi dalam proses produksi. Dengan kata lain, para ekonom Marxis dan sejarawan ekonomi berpendapat bahwa setiap zaman sejarah ditandai dengan mode produksi yang dominan.

Ekonom Marxis dan sejarawan ekonomi juga berpendapat bahwa sejarah mode produksi (setidaknya sampai dan termasuk mode produksi kapitalis) mengalami kontradiksi. Alasan untuk kontradiksi-kontradiksi ini telah menjadi fakta bahwa satu kelas dalam masyarakat (kapitalis) surplus telah dialokasikan melalui kontrol atas alat-alat produksi, sementara kelas lain (pekerja) telah melakukan pekerjaan yang sebenarnya dan hanya cukup untuk menjamin reproduksinya. Oleh karena itu, Marxian menganalisis kekuatan pendorong dalam sejarah manusia menjadi perjuangan kelas atas perampasan surplus.

NEO-KLASIK DAN MARXIAN: PERBANDINGAN DALAM TEORI EKONOMI

Secara garis besar untuk menggambarkan proses perkembangan ekonomi tergantung pada apakah seseorang menggunakan kerangka analisis neo-klasik atau Marxian. Model neo-klasik¹⁶ memandang proses pembangunan secara bertahap, halus, seimbang, dan harmonis dengan efek-efek penyebaran yang menguntungkan. Pada kutub lain, model Marxian memandang proses perkembangan sebagai ketidakseimbangan dan mengganggu (*disruptive*) yang penuh konflik sosial dengan efek-efek yang kurang baik. Setiap model pengembangan memiliki kekuatan dan kelemahan, sehingga hal terbaik adalah menggabungkan yang terbaik dari kedua model untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat dan memadai dari proses perkembangan ekonomi.

¹⁶Pada 1980-an, ide liberalisme laissez-faire dihidupkan kembali, di bawah label ekonomi neo-klasik. Jan Drahhokoupil, "Re-Inventing Karl Polanyi: On the Contradictory Interpretations of Social Protectionism", *Sociologický Časopis/Czech Sociological Review*, Vol. 40, No. 6, (December, 2004), pp.835-849. Published by: Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic.

Pada bagian sebelumnya beberapa kelemahan dari teori neo-klasik untuk studi sejarah ekonomi sudah disebutkan, khususnya ketidakcukupan teori neo-klasik untuk menganalisis perubahan ekonomi jangka panjang, yang mencakup proses pembangunan ekonomi. Penyebab ketidakmampuan model neo-klasik adalah kerangka analitisnya terbatas yang memang tidak dirancang untuk memperhitungkan peran faktor non ekonomi dalam perubahan ekonomi jangka panjang. Kerangka neo-klasik juga membatasi *ceteris paribus* (apabila segala sesuatu tetap sama). Namun, karena proses sejarah pembangunan melibatkan kedua faktor, yaitu ekonomi maupun non ekonomi,¹⁷ dan tidak ada jangka panjang yang tetap sama, cara yang baik mungkin untuk mengatasi keterbatasan model neo-klasik dengan memperluas analitis framework. Dalam konteks sosial budaya, peran faktor non ekonomi dalam perubahan ekonomi jangka panjang dapat diandalkan.

Model neo-klasik telah mengabaikan aspek struktural dalam evolusi sistem ekonomi. Model Marxis justru memusatkan perhatiannya pada aspek struktural. Dengan mengeksplorasi hubungan yang kompleks antara struktur sosial dan kinerja ekonomi, pengetahuan sejarah ekonomi Marxis memberikan kontribusi penting terhadap kajian sejarah ekonomi, dimana teori neo-klasik mengabaikan hal itu. Artinya, pendekatan Marxian lebih menunjukkan kekuatan di wilayah di mana model neo-klasik telah mengalami pelemahan. Penerapan model Marxian untuk mempelajari sejarah ekonomi mengalami kelemahan, pada saat mana sejarawan ekonomi baru mengalami penguatan dalam menerapkan model neo-klasik. Kelemahan ini termasuk ketidaktertarikan umum pada bagian dari sejarawan ekonomi Marxis untuk memvalidasi hipotesis dengan menguji bukti empiris. Tidak hanya kegagalan dalam menentukan model secara ketat, tetapi juga sebagian besar telah tertarik dalam mengembangkan informasi kuantitatif¹⁸ yang diperlukan untuk menguji model. Akibatnya, sejarawan ekonomi Marxian umumnya menunjukkan sedikit minat dalam memperluas lingkup kerangka teoritisnya dalam menjelaskan bukti empiris.

¹⁷ Model neo-klasik memiliki keserupaan dengan pendekatan makro ekonomi, yang tidak mengcover faktor non ekonomi, semisal perbedaan mentalitas, perangkat nilai di antara kelompok etnis yang memang merupakan elemen dalam dimensi budaya dan sosial. Untuk memperoleh pemahaman yang kompleks terhadap sejarah ekonomi, sangatlah diperlukan juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor di luar ekonomi. J. Thomas Lindblad, "Tema-tema Kunci dalam Sejarah Ekonomi Modern Indonesia", dalam J. Thomas Lindblad (Ed), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm.37.

¹⁸ Masuknya unsur kuantitatif dalam penjelasan sejarah seperti yang disebutkan Pierre Chaunu merupakan perkembangan baru dalam sejarah ekonomi baru, karena dengan tersedianya data statistik yang memadai, maka dinamika struktural bisa dilacak kembali ke periode silam. Lihat Pierre Chaunu, "Past Achievements and Future Prospects", dalam Jacques Goff & Pirre Norra (Ed.), *The Past: Essays in Historical Methodology*, (London, New York: Cambridge University Press, 1985), hlm. 38-39.

KOTA SURABAYA DAN SEMARANG DALAM HISTORIOGRAFI EKONOMI

Perdagangan telah menjadi urat nadi Kota Surabaya, di samping sektor industri yang kehadirannya memerlukan proses sejarah yang panjang. Posisi Surabaya sebagai jalur lintas perdagangan, sebenarnya sudah bisa ditelusuri ketika masa prakolonial. Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu (baik Kediri, Singosari, dan Majapahit) di Jawa Timur telah mampu merajut jaringan dengan beberapa pedagang Asia lainnya. Jaringan ekonomi, khususnya perdagangan ini dipertegas oleh kehadiran komunitas muslim di Indonesia, yang bergerak dari wilayah pantai untuk kemudian membentuk pusat komunitas muslim baru di pedalaman.¹⁹ Sekalipun dalam era ini menurut Nasution, peranan Surabaya tidak sekuat Tuban.²⁰ Menjelang akhir abad ke-15 ketika kekuasaan Kerajaan Majapahit menurun, penguasa Surabaya memanfaatkan kesempatan itu untuk otonom dan selama lebih kurang satu abad Surabaya tampil sebagai negara kota yang memiliki jaringan dagang yang sangat luas yang didukung oleh komunitas pedagangnya.²¹

Kota Surabaya menjadi pusat industri dan memiliki posisi setara dengan kota-kota pelabuhan utama Asia seperti Kalkuta, Singapura, Hongkong, dan Shanghai dalam menerapkan tenaga uap pada industri modern pertengahan abad ke-19. Menurut Howard Dick alih teknologi yang terjadi di kota Surabaya tidak mengarah pada proses industrialisasi kumulatif.²² Perluasan industri ternyata tidak berlangsung pesat sampai pertengahan 1970-an. Pada pertengahan 1980-an merupakan periode awal sebagai tahap pengganti impor yang diikuti oleh dorongan ekspor non-migas. Perubahan orientasi menuju ekspor telah memperluas pasar dan akhirnya tampak sebagai sebuah proses swadaya dalam industrialisasi. Dasar ekspor yang terjadi di Kota Surabaya tidak lagi terdiri atas produk pertanian, melainkan pada industri manufaktur.

Dick membuat deskripsi mengenai Surabaya dengan mengadakan pembedaan antara *kota hilir* dan *kota hulu*. Kota hilir digunakan untuk menyebut wilayah pelabuhan beserta daerah pusat niaga. Kota hulu merupakan sebutan untuk daerah pinggir kota yang lebih didominasi oleh pemukiman masyarakat. Perkembangan pemukiman ini dimungkinkan karena perkembangan sistem transportasi umum yang terakses dengan baik. Sampai pertengahan abad ke-19, perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki, karena sarana angkutan kereta kuda hanya digunakan orang kaya. Pengangkutan kereta kuda pertama diperkenalkan tahun 1859, khususnya

¹⁹ Bambang Purwanto, "Merajut Jaringan di Tengah Perubahan: Komunitas Ekonomi Muslim di Indonesia Pada Masa Kolonial", dalam *Lembaran Sejarah*, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Vol. 2, No. 2, 2000.

²⁰ Nasution, *Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-1930)*, (Surabaya: Pustaka Intelektual, 2006).

²¹ H. W. Dick, *Surabaya, City of Work. A Twentieth Century Socioeconomic History*, (diajukan untuk diterbitkan ASAA Southeast Asia Publications Series, Maret 1998), hlm. 143.

²² H. W. Dick, "Industrialisasi Abad ke-19: Sebuah Kesempatan yang Hilang?", dalam J. Thomas Lindblad (Ed), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 176-210.

untuk membawa para kuli antar-kota ke pangkalan armada baru di muara sungai, Kali Mas.

Lapangan kerja non pertanian selama abad ke-19 terpusat di pemukiman Eropa dan Cina. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya perkantoran milik perusahaan dagang Cina dan perusahaan Eropa, gudang untuk ekspor impor, pabrik-pabrik besar dan bengkel mesin beserta peralatannya, toko-toko kecil. Sisa-sisa dari bangunan fisik sebagai bukti dari perkembangan ekonomi Surabaya masih bisa disaksikan di kawasan Jembatan Merah Surabaya. Sebagai kota dagang, Surabaya mempunyai gudang-gudang di sepanjang sungai Kali Mas dan Pegirian untuk menimbun barang dari pedalaman yang dibawa ke hilir (muara sungai) untuk selanjutnya diekspor dengan dikapalkan ke pasar dunia. Perluasan jalur kereta api di seberang barat Kali Mas tahun 1880 yang diikuti tahun 1900 oleh perluasan di sepanjang sisi timurnya.²³ Dua jalur ini memberikan akses bagi pedalaman ke pelabuhan dan mendorong pembangunan sederetan pergudangan hingga awal abad ke-20. Sejak itu, kereta api menjadi sarana pengangkutan utama untuk produk gula dari pabrik di pedalaman. Jalur kereta api dan trem telah memperkuat kontrol penguasa Surabaya atas daerah pedalaman.

Dalam konteks jaringan kota dengan pedalaman, Dick mengatakan bahwa untuk memahami peranan Kota Surabaya harus dilihat pada relasi antara kota, pedalaman, dan dengan dunia luas.²⁴ Pendapat itu didasarkan pada kuatnya pengaruh konsep kota pelabuhan yang mendorong kemajuan kota Surabaya. Dick mengutip pendapat Frank Broeze bahwa kota pelabuhan merupakan pengantin laut yang menghubungkan daerah pedalaman dan daerah depan dalam kesatuan yang dinamis untuk menghadirkan komunitas kota yang bersifat dan bersuasana khusus. Reeves, Broeze, dan Mc. Pherson menyebutnya sebagai sintesa multidisiplin kota dan pelabuhan yang dinamis.²⁵ Kota pelabuhan merupakan istilah cangkokan yang diterapkan dalam kepustakaan oleh Max Weber sebagai kategori dalam wacana sosiologi. Terkandung teori khusus di dalamnya, seperti diakui Reeves, Broeze dan Mc. Pherson, pelabuhan dalam “kota pelabuhan” tidak bisa hanya sebagai pelengkap. Apa yang menjadi batas di luar kota dengan pelabuhan sehingga menjadi “kota pelabuhan” dan berkembang sampai pada tahap tertentu di mana kota bergeser menjadi pelabuhan?, hubungannya tidak bisa ditunjukkan.

Pada abad lalu kota besar hampir selalu terletak di tepi air, karena hanya melalui air terdapat pengangkutan barang berbiaya murah. Namun dengan perkembangan komunikasi dan transportasi yang tidak hanya bertumpu pada “pelabuhan”, pengangkutan barang juga berlangsung pada “pelabuhan kering”, sehingga sangat-sangat dimungkinkan sebuah kota letaknya terpisah dari laut atau jalur air utama.²⁶ Aspek lain dari persoalan ini adalah bahwa semua kota

²³ H. W. Dick, 1998, *op. cit.*, hlm. 201-202.

²⁴ Howard W. Dick, 1998, *op. cit.*, hlm. 415

²⁵ Howard W. Dick, 1998, *op. cit.*, hlm. 416

²⁶ Dick mencontohkan fungsi utama pelabuhan laut Chicago terhenti, bergeser ke fungsi utama ke lalu lintas udara, kereta api, jalan raya, dan telekomunikasi. Dalam beberapa

menjalankan sejumlah fungsi, hanya beberapa yang langsung terkait dengan perdagangan dan pengangkutan. Terlebih pertumbuhan sebuah kota selalu membawa konsekuensi pada keberagaman fungsi kota. Karenanya, Dick mempunyai cara berpikir bahwa fungsi pelabuhan harus diangkat di luar fungsi pemerintahan, industri, perbankan, dan pendidikan. Konsep hierarki kota sangat dimungkinkan lebih bisa diterapkan untuk melihat dasar ekonomi suatu kota. Kota pada puncak hierarki, semisal ibukota dengan sendirinya memiliki serangkaian fungsi. Pada tingkat di bawahnya, fungsi kota semakin berkurang. Dengan pertimbangan di atas, Dick menghindari istilah “kota pelabuhan”, karena setiap kota memiliki pelabuhan laut ataupun tidak, merupakan sebuah sistem yang bertumpu pada input dan output yang mampu menggerakkan perkembangan kota.

Sampai akhir abad ke-20, kota-kota di Indonesia masih belum dianggap sebagai satuan ekonomi fungsional. Dalam kasus Kota Surabaya, data perdagangan merupakan rangkaian jangka panjang yang bisa digunakan untuk menunjukkan relasi antara kota, pedalaman, dan dunia luar. Perubahan volume dan komposisi perdagangan asing Surabaya menyajikan sebuah fakta mengenai peran kota dan pedalaman bagi perekonomian global.²⁷ Meskipun kurang memuaskan, kisah itu dilengkapi dengan data perdagangan domestik antara Surabaya dengan pulau-pulau lain di Indonesia.²⁸

Semarang sebagai sebuah kota yang terletak di kawasan pesisir utara Jawa memiliki karakteristik yang tentu saja sangat berbeda dengan sebuah kota yang terletak di pedalaman. Jangankan keberlainannya dengan kota di pedalaman, untuk mempersandingkan dengan Kota Surabaya yang memiliki karakter geo-ekologis serupa, pesisir utara Jawa, dengan sendirinya memiliki tingkat keberlainan yang sudah pasti mempengaruhi faktor-faktor perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kedua kota itu. Terdapat satu lingkungan perkotaan dan lingkungan geo-ekosistem yang mendasari kehadiran Kota Semarang di dalam perjalanan sejarahnya. Kota Semarang berinteraksi dan terhubung dengan baik dalam jaringan antar lokasi-lokasi yang terdekat, atau tidak jauh dari lingkungan kotanya. Lingkungan ini meliputi lingkungan geografis, ekologis, ekosistem, dan lingkungan yang bersifat kultural dan ekonomis. Faktor-faktor ekosistem dan ekonomi mampu menjadi dasar, menunjukkan keterhubungan lokasi geo-ekosistem antara pesisir dengan pedalaman yang berkontribusi memberi pengaruh pada lingkungan (*environment*) yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, dan kultural. Secara ekonomi, sejak awal kota-kota pesisir utara Jawa mempunyai fungsi ekonomi terutama terlihat pada aspek perdagangan. Terbentuknya kota-kota pesisir Jawa umumnya distimulus oleh

hal, Dick menekankan bahwa konsep “kota” menjadi “pelabuhan” akan kehilangan semua maknanya, apabila hanya didasarkan pada lalu lintas ke luar masuk barang. *Ibid.*, hlm.416.

²⁷ Indriyanto, “Menjadi Pusat Pelayaran dan Perdagangan Iterregional: Pelabuhan Surabaya 1900-1940”, Disertasi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2017)

²⁸ Singgih Tri Sulistiyanto, “The Java Sea Network: Patterns in The Development of Interregional Shipping and Trade in the Process of National Economic Integration in Indonesia, 1870s-1970s”, *Disertasi* (Leiden: Leiden University, 2003)

adanya *maritime trade* dan interaksinya dengan daerah *hinterland-nya* yang menghasilkan komoditas perdagangan.

Interaksi yang intens antara pedalaman dan kota pantai terjadi secara luas di kota-kota pesisir utara pulau Jawa. Keterhubungan itu dilukiskan dengan jelas oleh Cobban²⁹ dalam tulisannya, bahwa Semarang merupakan kota pelabuhan utama dan pusat administratif di Jawa Tengah sejak awal abad ke-20. Pencapaian itu karena sebagian untuk memperluas akses ke daerah pedalaman yang telah berlangsung selama abad ke-19. Ekspansi itu terkait erat dengan pembangunan sarana transportasi untuk kepentingan pemilik perkebunan yang membawa produk perkebunan mereka ke pelabuhan untuk selanjutnya dikirim ke pasar luar negeri melalui pelabuhan Semarang. Pemerintah kolonial Belanda membangun kanal di sebelah timur sungai pada tahun 1870. Pembangunan itu sebagai fasilitas pelabuhan yang mendukung kapal besar dapat berlabuh sampai ke pusat kota yang dekat dengan kawasan komersial. Kawasan komersial itu dipenuhi oleh kantor dagang Eropa dan gedung pergudangan pedagang Cina, agen perusahaan perkebunan, dan perbankan.

Pada akhir abad ke-19, hampir seluruh kehidupan ekonomi dari Jawa Tengah terpusat di Semarang. Pentingnya Semarang sebagai sebuah pusat administratif meningkat setelah 1906. Semarang telah ditingkatkan kedudukannya sebagai pelabuhan utama dan perdagangan di pantai utara pulau Jawa dan merupakan salah satu kota terkemuka di Indonesia kolonial, setelah Batavia dan Surabaya.

Pada tahun 1906, banyak kota bawah diperuntukkan sebagai wilayah bisnis Eropa dan Cina, bangunan gereja-gereja, hotel, toko, rumah sakit, instansi militer, dan rumah orang Eropa. Sementara penduduk pribumi bertempat tinggal di bagian selatan dan barat. Wilayah kota bawah dan pelabuhannya dengan berbagai fasilitas tetap difokuskan sebagai kegiatan perdagangan selama akhir masa kolonial. Keberhasilan Semarang sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat administrasi pada awal abad ke-20 telah mempengaruhi jumlah penduduk kota. Beberapa di antaranya adalah orang Belanda, orang Indonesia yang berasal dari pedalaman Jawa dan luar Jawa.

Pemerintah Kota Semarang dalam membangun infrastruktur perkotaan berhadapan dengan beberapa masalah yang khas sebagai kota kolonial di Jawa. Demikian halnya dewan kota menemui kesulitan dalam mengelola problem perkotaan. Frederick dalam tulisannya menggambarkan bahwa pada akhir 1920-an, melalui foto udara memperlihatkan perbedaan secara jelas antara daerah pedesaan dan perkotaan. Daerah perkotaan menunjukkan sebagai daerah kantong Eropa. Salah satu kesulitan konseptual dalam memahami secara akurat tentang urbanisasi di Asia Tenggara, baik di era tradisional, kolonial, maupun kontemporer, adalah adanya anggapan bahwa penduduk atau masyarakat kota merupakan orang yang tidak benar-benar asli penduduk kota. Akibatnya, pengamat mempunyai kecenderungan untuk tidak melihat kota sebagai produk pertumbuhan dari proses

²⁹ James L. Cobban, "Kampungs and Conflict in Colonial Semarang", *Journal of Southeast Asian Studies*, September 1988, Vol. XIX, No. 2.

sejarah panjang yang didominasi oleh penduduk pribumi. Oleh karenanya, hanya ada sedikit celah untuk menggambarkan sifat dan dinamika masyarakat perkotaan pribumi.³⁰

Heilbroner memberikan penjelasan mengenai penduduk kota yang sangat mempengaruhi mekanisme pasar karena susunan masyarakat kota yang heterogen dan penuh vitalitas.³¹ Pada bagian lain, Heilbroner mengkaji munculnya masyarakat pasar yang sesungguhnya pertama-tama muncul di kota-kota di Italia dan Belanda yang diawali dengan fenomena pedagang keliling, orang Inggris menamakan *Pie Powder* (kaki berdebu). Kedudukan pedagang ini dalam masyarakat diremehkan, namun kehadirannya memberi warna bagi warga kota. Disampaikan Heilbroner bahwa perkembangan kota merupakan rangsangan kuat untuk menggerakkan perdagangan dan uang, karena tiap kota mempunyai pasar sendiri, gudang, dan bengkel. Munculnya pedagang keliling dan tumbuhnya kota-kota adalah dua faktor yang menyebabkan timbulnya masyarakat pasar dalam perekonomian awal.³²

Salah satu teori ekonomi (*economic theory*) menggambarkan bahwa proses terbentuknya kota-kota pertama di dunia adalah adanya kekuatan simpul distribusi dan kolektor ekonomi wilayah. Dalam prosesnya, perdagangan menjadi salah satu stimulus bagi tumbuhnya kota dalam suatu wilayah.³³ Kota-kota pertama di Indonesia juga terbentuk oleh arus alur perdagangan, seperti wilayah pantai pada muara sungai yang merupakan simpul pertukaran barang dan pada perkembangannya menjadi pembentuk pasar. Pasar tersebut berimplikasi pada terciptanya kegiatan perdagangan kecil lainnya yang bersifat urban yang ditandai oleh terlibatnya pedagang individu dalam memasarkan komoditas produk industri.

CATATAN AKHIR

Semarang dan Surabaya sebagai kota yang berada di pesisir mempunyai posisi yang menguntungkan. Posisi kedua kota itu sebagai kota kolonial, kemudian berkembang menjadi kota dagang, kota industri, dan kota bandar yang ditandai dengan adanya infrastruktur pelabuhan ekspor-impor. Dengan kedudukan seperti itu, posisi dan peranan keduanya memungkinkan berkembangnya sector lain seperti yang ditulis Mutiah Amini³⁴ dan Samidi tentang berkembangnya gaya hidup, modernitas, dan identitas Kota. Perkembangan Kota Surabaya dan Semarang sama-sama didukung oleh wilayah hinterlandnya atau wilayah luarnya. aktivitas antara

³⁰ William H. Frederick, "Hidden Change in Late Colonial Urban Society in Indonesia", dalam *Journal Southeast Asia Studies (JSAS)*, Vol. XIV, No. 2, September 1983.

³¹ Robert L. Heilbroner, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, Penerjemah: Sutan Dianjung, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 38-39.

³² *Ibid.*, hlm. 64.

³³ Sugiono Soetomo, *Urbanisasi dan Morfologi: Proses Perkembangan Peradaban dan Wadah Ruangnya Menuju Ruang yang Manusiawi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 29.

³⁴ Mutiah Amini, "Industrialisasi dan Perubahan Gaya Hidup: Semarang pada Awal Abad Keduapuluh", *Jantra*, Vol.IV, 2009, No.8, hlm.621-629.

pasar di kota dan desa mempunyai fungsi yang berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Lulofs, C, Poensen, C., H.C. van den Bos, Jennifer Alexander, dan Titi Surti Nastiti.

Beragam fungsi dan karakteristik pasar sebagai ruang ekonomi yang berkembang di desa dan perkotaan memberi kontribusi pada pemetaan bagaimana kajian ekonomi kota dan pasar perkotaan dipahami dalam bingkai historiografis. Dalam konteks ekonomi kota, antara Kota Semarang dan Surabaya memberi pelajaran historis yang berharga hingga awal abad ke-20. Kedua kota sudah berkembang tidak hanya sebatas sebagai pasar komersial, namun juga menjadi pelopor atas berlangsungnya kehidupan modern dengan segala fasilitasnya. Pasar yang pada awalnya hanya entitas ekonomi yang kecil di kedua kota, berkembang dan tumbuh menjadi salah satu ruang utama ekonomi karena didukung oleh pembangunan akses jaringan jalan yang teratur.

Dalam membahas satu bangunan ekonomi, kita bisa lihat adanya bangunan struktur dan sistem yang menentukan keberadaan dan kelangsungan kehidupan masing-masing dalam lingkungan masyarakat perkotaan. Ada kesamaan pola atau *patern*, yang beda wujudnya pada masyarakat kota pelabuhan antara Surabaya dan Semarang. Ada berbagai ragam, struktur, dan sistem dari basis ekonomi yang ada di kota pesisir berdasarkan basis-basis ekonomi dasarnya, perdagangan, ekonomi industri, dan jasa. Dalam industri ada sistem upah kerja yang ditentukan hari, minggu atau jam. Secara makro terdapat struktur, ada bagian-bagian pokok yang sangat khas di kota pesisir yang bisa digunakan untuk memahami pola atau bangunan yang menjadi karakter perekonomian Kota Semarang dan Surabaya. Pasarnya berlokasi di pesisir. Di dalam pasar, kita dapat melihat konstruksi dan pengaturan tatanan pasar sebagai basis ekonomi. Dengan demikian, kita dapat melihat relasi antara kota dengan pedalaman, antara lingkup regional, dan dalam lingkup dengan dunia global sebagaimana yang tercermin dalam konstruksi tatanan dalam pasar. Pada akhirnya harus diakui bahwa perilaku pasar yang ada di pusat dan yang ada di lokal atau pinggiran kota yang berhadapan dengan konsumen, masih menyisakan masalah yang memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya yang terkait dengan ekonomi perkotaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, Mutiah, "Industrialisasi dan Perubahan Gaya Hidup: Semarang pada Awal Abad Keduapuluh", *Jantra*, Vol.IV, 2009, No.8.
- Chaunu, Pierre, "Past Achievements and Future Prospects", dalam Jacques Goff & Pirre Norra (Ed.), *The Past: Essays in Historical Methodology*, (London, New York: Cambridge University Press, 1985).
- Cobban, James L., "Kampungs and Conflict in Colonial Semarang", *Journal of Southeast Asian Studies*, September 1988, Vol. XIX, No. 2.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

- Dick, H.W., *Surabaya, City of Work. A Socioeconomic History, 1900-2000*, (Athens: Ohio University Press, 2002).
- Dick, H.W., "Industrialisasi Abad ke-19: Sebuah Kesempatan yang Hilang?", dalam J. Thomas Lindblad (Ed), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2000)
- Djojohadikusumo, Sumitro, "Pendekatan Seorang Ekonom terhadap Perspektif Historis, Beberapa Pengamatan Acak", dalam J. Thomas Lindblad (Ed), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2000).
- Drahhokoupil, Jan, "Re-Inventing Karl Polanyi: On the Contradictory Interpretations of Social Protectionism", *Sociologický Časopis/Czech Sociological Review*, Vol. 40, No. 6, (December, 2004), pp.835-849. Published by: Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic.
- Frederick, William H., "Hidden Change in Late Colonial Urban Society in Indonesia", dalam *Journal Southeast Asia Studies (JSAS)*, Vol. XIV, No. 2, September 1983.
- Frijling, W., "Exploitatie van Passers", dalam *Tijdschrift voor het Binnelandsch Bestuur (TBB)*, Vijf en Veertigste deel, (Batavia: Kolff & Co, 1913).
- Heilbroner, Robert L., *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, Penerjemah: Sutan Dianjung, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Houben, V.J.H., dan Lindblad, J.Th., "Menuju Historiografi Ekonomi Nasional di Indonesia", dalam J.Th. Lindblad (Ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, 2002).
- Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).
- Klein, P.W., "Pidato Kunci: Penulisan tentang Ekonomi Nasional di Indonesia", dalam J.Th. Lindblad (Ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, 2002).
- Lindblad, J. Thomas, "Tema-tema Kunci dalam Sejarah Ekonomi Modern Indonesia", dalam J. Thomas Lindblad (Ed), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2000).
- Lulofs, C., "Pasarinrichting en pasarbeheer met bouwplan en bijlangen", *Tijdschrift voor Het Binnenlandsh Bestuur*, Zeven en Veertigste Deel, (Batavia: G. Kolff & Co., 1914).
- Nastiti, Titi Surti, *Pasar di Jawa Pada Masa Mataram Kuno Abad VIII-XI Masehi*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003).
- Nasution, *Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-1930)*, (Surabaya: Pustaka Intelektual, 2006).
- Poensen, C., "Naar en op de Pasar", dalam *Mededeelingen van het Nederlandsche Zendelinggenootschap*, tahun ke-26, 1882.

- Purwanto, Bambang, "Merajut Jaringan di Tengah Perubahan: Komunitas Ekonomi Muslim di Indonesia Pada Masa Kolonial", dalam *Lembaran Sejarah*, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Vol. 2, No. 2, 2000.
- Purwanto, Bambang, "Dekonstruksi Historiografis dan Mencari Pemikiran Kesejarahan Yang Mencerdaskan", Makalah disampaikan pada *Studium General* Program Studi Pendidikan IPS Program Pascasarjana Unnes, Semarang 19 Maret 2011.
- Wie, Thee Kian, *Explorations in Indonesian Economic History*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI –LIPI, 1994).
- Saidi, Zaim, "Menghidupkan Hari Pasaran", *Republika*, Sabtu, 17 November 2012, No. 303, Th. Ke-20.
- Soetomo, Sugiono, *Urbanisasi dan Morfologi: Proses Perkembangan Peradaban dan Wadah Ruangnya Menuju Ruang yang Manusiawi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Supriyono, Agus, *Buruh Pelabuhan Semarang: Pemogokan-pemogokan Pada Zaman Kolonial Belanda, Revolusi, dan Republik 1900-1960*, Yogyakarta, 2008.
- Thee Kian Wie, *Explorations in Indonesian Economic History*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI –LIPI, 1994).
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Alih bahasa: Haris Munandar & Puji A.L., (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003).
- Van den Bos, H.C., "Het een en ander het "Pasar" of Marktwezen in de Gouvernementslanden op Java en Madoera" (1) hal: 945-975, dalam *Koloniaal Tijdschrift*, Tweede Jaargang – eerste Halfjaar, (Uitgegeven door de Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indie, 1913).
- Villar, Pierre, "Constructing Marxist History", dalam Jacques Goff & Pirre Norra (Ed.), *The Past: Essays in Historical Methodology*, (London, New York: Cambridge University Press, 1985).